

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Carter (1991) mendefinisikan kesiapsiagaan bencana sebagai tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi-organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006). Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil (Hidayati, 2008). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan pada dasarnya merupakan bentuk aktivitas untuk menghindari risiko yang terjadi apabila suatu saat terjadi bencana dan apabila bencana masih lama terjadi.

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2017). Secara geografis kepulauan Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana karena termasuk dalam wilayah *Ring of Fire* (Deretan gunung berapi pasifik) yang bentuknya melengkung dari utara pulau Sumatra - Jawa - Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara. Namun, dibalik bahaya yang mengancam, Indonesia memiliki banyak pesona alam dan budaya yang tak tertandingi. Hal ini tentunya mampu menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara, walaupun seringkali berlangsungnya aktivitas wisata masih mengabaikan risiko bencana. Bahkan kawasan wisata yang memiliki tingkat risiko yang tinggi justru semakin diminati wisatawan.

Kesiapsiagaan wisatawan sangatlah penting diterapkan demi keselamatan wisatawan dan keberlangsungan pariwisata di kawasan wisata itu sendiri. Namun, kesadaran wisatawan akan kesiapsiagaan masih rendah. Kesiapsiagaan tentunya

memiliki tujuan, Greg dalam (Dodon, 2013) menjelaskan bahwa kesiapsiagaan memiliki tujuan guna meminimalisir efek samping yang berbahaya dengan tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai serta efisien untuk tanggap darurat dan penanggulangan bencana.

Kesiapsiagaan lebih ditekankan pada kemampuan dalam melakukan kegiatan persiapan tanggap darurat dengan cepat dan akurat terkait upaya penanggulangan bencana (Kusno & Uci, 2019). Kesiapsiagaan juga sangat berperan penting dalam pengurangan potensi terganggunya kondisi psikologis masyarakat. Hal ini timbul dari keterkejutan jiwa dan kepanikan ketika secara tiba-tiba bencana melanda. Korban bencana beresiko mengalami trauma yang menghasilkan gangguan stres sebanyak 3,8% dibandingkan kejadian traumatis lainnya, Mendatu dalam (Elyusra, 2013). Namun, sikap kesiapsiagaan terhadap bencana yang belum menyeluruh menjadi permasalahan pada seluruh masyarakat (Ida et al., 2019) Dapat disimpulkan bahwa tujuan kesiapsiagaan itu sendiri yaitu guna meminimalisir ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, meminimalisir kerentanan masyarakat, meminimalisir akibat dan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

Kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah saat menghadapi bencana di Indonesia belum dapat diantisipasi dengan baik karena minimnya sosialisasi dari Lembaga Pemerintahan atau Lembaga Non Pemerintahan sehingga memperparah kondisi masyarakat yang terdampak bencana (Dewi, 2020). Kondisi ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana disebabkan oleh belum banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah maupun pihak lainnya karena terbatasnya sumberdaya yang dimiliki (Paramesti, 2011). Ramli, Sri, Sari, & Dirhamsyah (2014) berpendapat bahwa banyaknya korban jiwa akibat bencana dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana serta kesiapan saat mengantisipasi bencana yang terjadi.

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana, yaitu: 1) pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana, 2) kebijakan dan paduan, 3) rencana untuk keadaan darurat

bencana, 4) system peringatan bencana, 5) kemampuan untuk mobilisasi sumber daya (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006).

Upaya kesiapsiagaan dilakukan melalui beberapa hal seperti penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana, penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana (UU No 24 Tahun 2007).

Upaya kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi dapat juga dilakukan oleh individu atau masyarakat. Hal ini yang membedakan upaya kesiapsiagaan dengan upaya pengurangan risiko prabencana lainnya (mitigasi dan peringatan dini), di mana upaya kesiapsiagaan dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat, sementara upaya mitigasi dan peringatan dini diarahkan terutama dari tingkat manajemen yang lebih tinggi seperti pemerintahan (Paramesti, 2011). Upaya kesiapsiagaan masyarakat berarti menyiapkan masyarakat agar tidak teralupani saat terjadi bencana sehingga kerugian dapat ditekan menjadi sekecil mungkin (Paramesti, 2011).

Masyarakat siaga memiliki ciri, mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, tingkat risiko yang dialami rendah, tingkat pemulihan pasca bencana berjalan cepat, memiliki jaringan yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan (Paramesti, 2011). Kesiapsiagaan tidak hanya melakukan berbagai tindakan-tindakan pencegahan, melainkan juga dengan penyesuaian kondisi bangunan yang menjadi tempat tinggal, misalnya adalah dengan menaikan pondasi bangunan rumah (Dodon, 2013). Indikator kesiapsiagaan antara lain adalah pengetahuan terhadap bahaya yang akan dihadapi, kebijakan dan panduan kesiapsiagaan, rencana untuk keadaan darurat, sistem peringatan bencana, dan kemampuan memobilisasi sumber daya. (Dodon, 2013).

Berdasarkan penjelasan diatas, persepsi risiko juga sangat penting untuk diperhatikan. Persepsi risiko (*Perceived Risk*) menurut *Schiffman* dan *Kanuk* (200:183) dalam (Picaully, 2018) adalah ketidakpastian yang konsumen hadapi

ketika mereka tidak bisa melihat konsekuensi dari keputusan pembelian mereka. Hal ini menekankan bahwa risiko yang mereka persepsikan, dengan tidak mempedulikan ada atau tidaknya keberadaan risiko dapat mempengaruhi wisatawan. Risiko yang wisatawan tidak persepsikan tidak akan mempengaruhi perilaku dari wisatawan itu sendiri. Se jauh ini teori persepsi risiko yang dikemukakan oleh Schiffman, memiliki keunggulan yaitu, Schiffman mengategorikan enam potensi kerugian sebagai risiko, diantaranya risiko fisik, risiko kinerja, risiko psikologis, risiko keuangan, risiko kerugian waktu, dan risiko sosial yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang lebih spesifik untuk niat berkunjung kembali wisatawan. Persepsi risiko menjadi perhatian utama bahwa industri ini harus membantu meningkatkan kesadaran akan bahaya yang mungkin dihadapi wisatawan ketika bepergian (Henderson, 2008). Pengambilan keputusan sangat di pengaruhi oleh persepsi risiko atau masalah keselamatan yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk bepergian dan pilihan tujuan (Sönmez & Graefe, 1998).

Maka dari itu, penting bagi wisatawan untuk memahami sejauh mana persepsi risiko mereka terhadap kunjungan wisata di Pantai Pangandaran, karena suatu peristiwa khusus atau serangkaian peristiwa dapat merusak persepsi tentang suatu tujuan. Peristiwa atau keadaan ini, secara individu atau dalam kombinasi memiliki dampak negatif pada persepsi keselamatan, keamanan atau keinginan destinasi wisata (Garg, 2013). Dengan memahami persepsi risiko, dapat memberikan manfaat dalam membangun kawasan wisata yang aman di kawasan wisata Pantai Pangandaran.

Keselamatan merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan wisatawan untuk memutuskan memilih destinasi wisata yang akan dikunjungi (Hermawan, 2017). Upaya meningkatkan keselamatan wisatawan dapat dilakukan dengan mengevaluasi setiap risiko bahaya melalui manajemen bahaya yang meliputi penerimaan atas kejadian yang dapat ditoleransi, meminimalisir risiko, dan mengalihkan risiko (Achjar. 2020).

Kunci sukses sebuah kegiatan pariwisata harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan (Kusuma dan Suryawan, 2016). Maka dari itu pengelolaan risiko wisata merupakan hal yang penting dalam menjamin keselamatan wisatawan.

Faktor fisik yang dapat membahayakan keselamatan wisata, bagaimana tingkatan bahaya tersebut, serta apa saja penyebab tingginya risiko wisata di kawasan Pantai Pangandaran perlu diketahui untuk mempermudah pengelolaan risiko. Jika faktor bahaya dapat diidentifikasi maka hal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola wisata dan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur penunjang keselamatan serta menurunkan jumlah kecelakaan di kawasan Pantai Pangandaran.

Upaya meningkatkan keselamatan wisatawan dapat dilakukan dengan mengevaluasi setiap risiko bahaya melalui manajemen bahaya yang meliputi penerimaan atas kejadian yang dapat ditoleransi, meminimalisir risiko, dan mengalihkan risiko (Achjar. 2020). Kunci sukses sebuah kegiatan pariwisata harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan (Kusuma dan Suryawan, 2016). Maka dari itu pengelolaan risiko wisata merupakan hal yang penting dalam menjamin keselamatan wisatawan. Faktor fisik yang dapat membahayakan keselamatan wisata, bagaimana tingkatan bahaya tersebut, serta apa saja penyebab tingginya risiko wisata di kawasan Pantai Pangandaran perlu diketahui untuk mempermudah pengelolaan risiko. Jika faktor bahaya dapat diidentifikasi maka hal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola wisata dan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur penunjang keselamatan serta menurunkan jumlah kecelakaan di kawasan Pantai Pangandaran.

Pangandaran adalah salah satu tempat yang menjadi obyek wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat dan terletak di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran dengan jarak \pm 92 km arah selatan Kota Ciamis. Sampai tahun 2011, kawasan ini masih termasuk dalam Kabupaten Ciamis, dan sejak tahun 2012 termasuk ke dalam Kabupaten Pangandaran, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis.

Wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Pangandaran sejauh ini didominasi oleh wisnus atau wisatawan domestik. Puncak kunjungan wisata di Pangandaran biasanya terjadi pada musim libur sekolah, hari raya Lebaran, libur Natal, dan Tahun Baru, dan kecenderungan ini masih terjadi hingga Juli 2023 saat peneliti mengunjungi langsung kawasan wisata di Pangandaran.

Kawasan Wisata Pantai Pangandaran merupakan salah satu objek wisata pesisir di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Wisata Pantai

Pangandaran menjadi objek wisata pantai andalan di Jawa Barat. Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran (2019) pada tahun 2017 Pantai Pangandaran dikunjungi oleh 2.061.547 wisatawan, pada tahun 2018 dikunjungi oleh 2.789.905, dan pada tahun 2019 dikunjungi oleh 2.665.211 wisatawan.

Kawasan Wisata Pantai Pangandaran memikat wisatawan dengan keindahannya. Namun wisata pantai memiliki risiko kecelakaan relatif tinggi dibandingkan aktifitas wisata di darat (Taofiqurohman et al., 2020). Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah kecelakaan yang dicatat oleh Balai Wisata Tirta (Balawista). Pada tahun 2016 terjadi 116 kecelakaan, pada tahun 2017 terjadi 176 kecelakaan, dan pada tahun 2018 terjadi 47 kecelakaan. Menurut Balai wisata, wisatawan tenggelam mendominasi kecelakaan yang terjadi di Kawasan Wisata Pantai Pangandaran. Umumnya kecelakaan wisata disebabkan oleh faktor oseanografi yang ada di Kawasan Wisata Pantai Pangandaran. Kawasan Wisata di Pantai Pangandaran memang menjadi tempat menarik bagi pengunjung karena keindahan pantainya, namun arus dan ombak Pantai Pangandaran pada periode tertentu dapat menjadi potensi bahaya bagi para pengunjung.

Faktor lainnya yang turut berperan dalam kecelakaan di pantai yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya pantai serta masyarakat belum memahami sepenuhnya makna dari rambu-rambu peringatan yang terdapat di sekitar Kawasan Wisata Pantai Pangandaran. Keselamatan merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan wisatawan untuk memutuskan memilih destinasi wisata yang akan dikunjungi (Hermawan, 2017).



Gambar 1.1 Tampak Kerusakan yang Terjadi di Pantai Timur Pangandaran Tepat Dekat Pelelangan Ikan

Sumber: TIMES Indonesia (2021)

Tepatnya tanggal 17 Juli 2006, terjadi serangkaian gempa bumi di wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Gempa pertama pukul 15.11 WIB berkekuatan 6,8 skala Richter (SR) berpusat di Samudra Hindia sekitar 360 kilometer (km) selatan Jakarta, atau sekitar 100 km dari kota Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian, terjadi gempa susulan berkekuatan 5,5 SR dan 6,1 SR. Getaran gempa terasa di Jakarta serta sejumlah wilayah seperti Pantai Pangandaran, Kabupaten Ciamis (Jawa Barat), Cilacap dan Kebumen (Jawa Tengah), Pantai Samas di Bantul (DI Yogyakarta), juga di Pacitan dan Surabaya (Jawa Timur). Kecamatan Pangandaran menjadi daerah terparah. Selain dekat dengan titik episentrum gempa, kawasan wisata ini berpenduduk lebih padat dibandingkan dengan daerah lain di pantai selatan Jawa.

Gempa Pangandaran tahun 2006 ini memicu Tsunami di kawasan pantai di Kecamatan Pangandaran, Kalipucang, Parigi, Cijulang, Sidamuih dan Cimerak. Gempa Pangandaran dengan Magnitudo 7,7 terjadi pada Senin, 17 Juli 2006 pukul 15.19 WIB di lepas pantai Pangandaran, sekitar 220 km. Kekuatan gempa 7,7 termasuk moderate dan biasanya tidak mengakibatkan tsunami lebih dari 5 meter.

Hampir semua warga-bahkan penduduk di desa-desa berjarak lebih dari 25 kilometer dari garis pantai-ikut mengungsi. Tsunami Pangandaran merenggut 668 korban jiwa, 65 hilang (diasumsikan meninggal dunia) dan 9.299 lainnya luka-luka. Pada hari Senin 17 Juli 2006 pukul 15.19 WIB, terjadi gempa dengan kekuatan

M7.7 dengan pusat di lepas pantai Pangandaran. Gempa yang terjadi di lepas pantai Pangandaran itu berkekuatan 'moderate'. Biasanya gempa seperti itu tidak menimbulkan tsunami dengan ketinggian lebih dari 5 meter. Akan tetapi tsunami Pangandaran menimbulkan tsunami dengan ketinggian rayapan mencapai 21 m. Jenis tsunami seperti itu dikategorikan oleh peneliti Kanamori sebagai tsunami-earthquake, yaitu gempa yang membangkitkan tsunami dengan magnitudo lebih besar daripada magnitudo gempanya.

Peristiwa kecelakaan maupun bencana alam di Kawasan Wisata Pangandaran dapat terjadi sewaktu-waktu dan mengancam keselamatan pengunjung. Hal ini merupakan salah satu bahaya yang terjadi di kawasan wisata ini. Menurut Grift (2006), bahaya adalah suatu kondisi yang timbul secara alamiah maupun karena perbuatan manusia, yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kehilangan jiwa manusia. Potensi bahaya dapat mengancam keselamatan dan keamanan pengunjung, aspek yang sangat penting dalam kegiatan wisata. Calon pengunjung memiliki banyak pilihan untuk berkunjung ke suatu tempat wisata. Kondisi tempat wisata yang aman dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisata. Pengunjung yang merasa aman saat berkunjung akan lebih banyak meluangkan waktunya serta memiliki kecenderungan untuk melakukan kunjungan kembali (Prasetyo, 2006). Sebaliknya, pengunjung yang memiliki pengalaman negatif akan memiliki kepuasan yang lebih rendah dan kemungkinan berkunjung kembali yang juga lebih rendah (Howard, 2009).

Manajemen bahaya dibutuhkan pada semua kawasan wisata, termasuk Kawasan Wisata Pantai Pangandaran, untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengunjung, dan lebih lanjut memastikan keberlanjutan wisata di suatu kawasan. Manajemen bahaya merupakan suatu kegiatan dengan maksud tertentu yang dilaksanakan oleh pengelola untuk mengurangi kemungkinan terluka, kematian, atau kehilangan hak milik yang terjadi pada partisipan dari sebab yang telah diketahui atau yang masih diperkirakan, baik bahaya alami maupun buatan manusia yang terdapat di suatu kawasan wisata (Jubenville et al., 1987). Untuk dapat mengembangkan manajemen bahaya, perlu dilakukan identifikasi persepsi risiko dan kesiapsiagaan wisatawan di Kawasan Wisata Pantai Pangandaran sebagai

masuk dan rekomendasi bagi pengelola dan pengunjung untuk dapat melakukan tindakan pencegahan, serta mengembangkan manajemen bahaya yang sesuai.

Ilmuan sosial, manajemen bencana, dan pembuat kebijakan publik pada umumnya mengorganisir penelitian dan panduan pengurangan bencana dalam empat fase, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan (Sutton & Tierney, 2006). Kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat sangat diperlukan, khususnya pada tahap pra-bencana. Menurut IDEP (2007) ada beberapa alasan kenapa kesiapsiagaan berbasis masyarakat itu diperlukan yaitu pertama pengurangan risiko bencana adalah tanggung jawab semua pihak tidak hanya pemerintah saja. Kedua, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas martabat, keselamatan, dan keamanan dari bencana. Ketiga, masyarakat adalah pihak pertama yang akan langsung berhadapan dengan ancaman bencana, oleh karena itu kesiapan dan kesiapsiagaan masyarakat akan menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat. Keempat, masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi risiko dengan meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana.

Hal ini mengakibatkan beberapa masalah di kawasan wisata ini, seperti pencemaran lingkungan dalam bentuk sampah masih banyak ditemukan di Kawasan Wisata di Pangandaran yang membuktikan kesadaran wisatawan akan kebersihan lingkungan masih rendah. Demi meningkatkan kenyamanan wisatawan, pembangunan fasilitas yang menunjangpun turut dibangun, namun pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat ini juga menimbulkan dampak negative yaitu banyaknya masyarakat pendatang yang memutuskan untuk menetap sehingga menyebabkan kepadatan penduduk di Pangandaran. Selain itu, penelitian mengenai persepsi resiko terhadap kesiapsiagaan wisatawan di Pangandaran sendiri masih jarang dilakukan sehingga perlu dilakukannya penelitian ini dengan harapan dapat membantu baik pemerintah maupun pengelola dalam memberi edukasi kepada wisatawan yang datang sehingga risiko atau dampak buruk yang sebelumnya terjadi dapat diminimalisir. Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena diatas, penting untuk meneliti dan menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan wisatawan di Kawasan Wisata Pantai Pangandaran Jawa Barat.

I.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi risiko wisatawan Pantai Pangandaran?
2. Bagaimana kesiapsiagaan wisatawan Pantai Pangandaran?
3. Bagaimana pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana wisatawan di Pantai Pangandaran?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi persepsi risiko wisatawan yang ada di kawasan wisata Pangandaran;
2. Untuk mengidentifikasi kesiapsiagaan wisatawan yang ada di kawasan wisata Pangandaran; dan
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana wisatawan di Pantai Pangandaran.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti berharap memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan konsep persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan wisatawan di Pangandaran.
2. Praktis
 - a. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau solusi dalam membuat peraturan untuk mengembangkan pariwisata di taman nasional agar tidak merusak kawasan lingkungan.
 - b. Bagi pengelola, dapat lebih memahami kebutuhan wisatawan, merencanakan langkah-langkah pengelolaan yang lebih baik dan membantu menciptakan bentuk pariwisata yang lebih berkelanjutan.
 - c. Bagi masyarakat, bagi masyarakat sekitar kawasan wisata di Pangandaran diharapkan dapat meningkatkan keaktifannya untuk turut serta dalam pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan kawasan wisata di Pangandaran. Serta bagi calon wisatawan agar dapat mematuhi peraturan yang ada dan menjaga lingkungan kawasan wisata

di Pangandaran agar tidak rusak.

I.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan sistematika penulisan yang telah disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang penelitian akan pentingnya persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan wisatawan di Pangandaran. Pada bab ini disampaikan juga rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab II berisi penjelasan dari beberapa konsep, teori, serta turunannya dari para ahli maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti untuk mendukung penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat pemaparan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum kawasan, karakteristik responden, persepsi dan perilaku wisatawan, hasil olahan data penelitian dengan menggunakan metode statistic yang sesuai.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan permasalahan berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN